

LAMPIRAN

KEPUTUSAN Kepala Biro Hukum dan Organisasi BADAN POM

NOMOR

TAHUN 2020

TENTANG

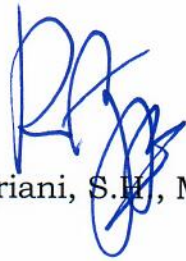
RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2020

### RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BPOM TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SK1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi	IKK1. 1. Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi 3. Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana 4. Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	3 4,30 4,30 3,3
2.	SK2. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukur	IKK2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana yang ditindaklanjuti	100
3.	SK3. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Obat dan Makanan	IKK3. Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan	100
4.	SK4. Tersedianya Advokasi hukum yang efektif	IKK4. Persentase Advokasi hukum yang diselesaikan	100
5.	SK5. Terwujudnya organisasi Biro Hukum dan Organisasi yang efektif	IKK5. 1. Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi 2. Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	81 81
6.	SK6. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKK6. Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	77

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	SK7. Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK yang Terintegrasi dan Adaptif	IKK7. Persentase pengelolaan TIK yang baik Biro Hukum dan Organisasi	70
8.	SK8. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	IKK8. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95% (Efisien)

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Riati Anggriani, S.H., M.A.R.S., M.Hum